

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Rohmad, 2012. *Hukum Progresif*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Agus Salim, 2001. *Teori-teori Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahaham Ulu, 2018. *Database Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu*, Samarinda.
- Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat, Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Bapeda Pemkab Mahulu, 2016. *Hukum Adat Istiadat Suku Dayak Penihing*, Ujog Bilang, CV. Nevola Jaya.
- Berman, H. J., 1983, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge, MA
- Bohannon, P. 1967, "Introduction", P. Bohannon (ed) *Law and Warfare*, New York: Natural History Press.
- Bonaventura de Sousa Santos, 1995. *Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, N. y. : Routledge
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Coomans, M., 1987, *Manusia Daya*, Jakarta: PT. Gramedia
- De Marcu, Joseph P, "Rawls and Marx" dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H. Gene Blocker (ed) Ohio: Ohio University.

- Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Atima.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2013., *Mediasi Pengadilan salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni
- Dominikus Rato, 2014. *Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya.
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016. *Keadilan Berdasarkan Pancasila – Dasar Filosofis dan Idiologis Bangsa*, Yogyakarta: Deepublis.
- Frans Hendra Winata, 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafica.
- George Ritzer, 1985. *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawaliipress.
- Gluckman, M., 1965, *Politics, Law and Ritual in Tribal Society*, Chicago: Aldine.
- Gunawan Wijaya, 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah Halim, dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah – Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual, Kosepsi Teoritis Nenuju Artikulasi Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikusuma H, , 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: C.V. Mandar Maju.
- Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Lahajir, 2001. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang*, Yogyakarta: Galang Press.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT.

Citra AdityaBakti

Muhammad Bakri. 2007. Hak menguasai Tanah oleh Negara, Yogyakarta: Citra Media.

Muhammad Muslih, 2004. *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar.

Muhammad Rustamaji, 2017. *Pilar-Pilar Hukum Progresif – Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

-----, Mochtar Kusumaatmadja, 1995. *Hukum, masyarakat dan pembinaan hukum nasional : suatu uraian tentang landasan pikiran, pola dan mekanisme pembaharuan hukum di Indonesia*, Bandung : Lemlit. Hukum dan Kriminologi FH-Unpad,

Rawls John, 1973, A. Theory of Justice, London: Oxford University

-----, “*basic Liberties and their Proirity*”, in Sterling M. McMurrin (ed), 1987, *Lberty, Equality. And Law*, Cambridge: Cambridge University Press.

Katzner, Louis, I, “*The Original Position and Veil of Ignorance*” dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H Gene Blocker (ed), Ohio: Ohio University.

Mahfud MD, 2011. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : AntonyLib.

Marbun B.N., 1996. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Maria Farida Indrati s., 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maria S.W. Sumardjono. 1998. Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madah Pada tanggal 14 Februari 1998. Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 2019. *Profil Kabupaten Mahakam Ulu, Samarinda*, Ciptamitratama Indonesia.
- Sally Folk Moore, 1993. *Antropologi Hukum. Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: MUP.
- , 2006. Dalam “*Menggagas Hukum Progresif Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Suyud Margono, 2000. *ADR, Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moore, F. F., 1970, *Law and Anthropology*, *Bien. Rev. Anthropol.*
- Munir Fuady, 2003. *Arbitrase Nasional – Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John, 1973. *Theory of Justice*, London: Oxford University.
- Rousseau, J., 1990, *Central Borneo: Ethnic Identity and Social Life in a*

Stratified Society, Oxford: Oxford University Press.

Sally Falk Moore, 1993. *Antropologi Hukum. Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Saidin, 2000, *Hukum Dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Ke 70 Prof. Dr.T.O. Ihromi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Semarang: Undip.

-----, 2003 .“Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang,” dalam *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

-----, 2005. “ hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan,” dalam *Jurnal Hukum Progresif*, vol.1, No. 1, Semarang: Undip.

-----, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas.

-----, 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta:Genta Press.

-----, 2010 . “Hukum Hendaknya Membuat Bahagia,” dalam *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

Schaefer, David Lewis, 1979, *Justice of Tyranny ? A Critique of John Rawls 'Theory of Justice*, New York: Kenniket.

Sellato Bernard, 2002. *Innermost Berneo – Studies In Dayak Cultures*, Singapore University Press.

-----, Sellato, B. 1986. *Les nomades forestier de Borneo et la sedentaristion*, unpublihed Ph.D. thesis, Paris.

Sirajuddin, Fatkhurrohman dan Zulkarnain, 2015. *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press.

Seojono Seokanto, 2006, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

- Soejono S. dan Purnadi P. 1993. *Prihal Kaidah Hukum*, Badung: Citra Adiya Bakti
- Soekanto Soerjono, 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerojo Wignjodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.
- Sudiyat Iman, 1985, *Asas-asas Hukum Adat*. Bekal Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Sulistyowati Irianto, 2000, *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke 70 Prof. Dr.T.O. Ihromi*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia,
- Suhrawardi K. Lunis, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryaman Mustari Pide A., 2015. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Teguh Prasetyo, 2016. *Sitem Hukum Pancasila – Perspektif Kedilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.
- Ter Haar Bzn B., Mr. 2013. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat – Terjemahan K. Ng Soebakti Pesponoto*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta.
- Van Dijk R., (Terjemahan oleh Mr. A. Soehardi), 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: C.V. Mandar Maju.
- Wolfgang Friedmann, 1953. *Legal Theory*, London: Stevens and Sons.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951)

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1)

### **C. Lain-lain**

Pantir Titus, 1990. *Hak Milik Menurut Hukum Adat Ditinjau dari UUPA No. 5 Tahun 1960* , (Makalah Seminar Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai).

Lodi, 1988. *Status Hukum Tanah Bekas Ladang Berpindah-Pindah Antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Hukum Adat di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah*, (Laporan Penelitian).

Bhumibhakti (Majalah) No. 09/1995

[https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/sih/hukum-adat/dasar\\_perundang-undangan-berlakunya-hukum-adat/](https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/sih/hukum-adat/dasar_perundang-undangan-berlakunya-hukum-adat/).

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=4158499154464423464&btnI=1&hl=en>.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>.

<http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol155/iss2/5>.



[http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME7-DCMSPCL\\_files/tojdac\\_v070DSE151.pdf.](http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME7-DCMSPCL_files/tojdac_v070DSE151.pdf)

## DAFTAR INDEKS BAHASA DAERAH SUKU DAYAK AOHENG

---

'a · 250

---

“posang” (mematok) · 314

---

### **B**

Bang Kalau · 239

bate · 239

bavi · 314

*bea* · 314

Berle'ang · 314, 336

bolek pari · 314

---

### **D**

Dayak Aoheng · 1, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 40, 52,  
53, 56, 60, 61, 66, 121, 239, 250, 256, 263, 268,  
269, 270, 272, 275, 276, 278, 280, 281, 282, 283,  
289, 295, 296, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 315,  
336, 340, 348, 359, 366, 372, 381, 389, 407, 411,  
416

Dayak Aoheng Huvung · 256

Dayak Aoheng Long Apari · 256

Dayak Aoheng Long Kerioq · 256

Dayak Aoheng Tiong Bu'u · 256

Dayak Aoheng Tiong Ohang · 256

Dayak Bahau · 239

Dayak Busang · 239, 250

Dayak Penhing · 250

Diling · 314

---

### **G**

gilir balik · 340

---

### **I**

Itun Savang · 314

Ivut · 314, 336, 340

ivut bootiq · 340

---

### **J**

jaan · 239

---

### **K**

kanon · 314

kepohang · 314

Kevangun · 314

kiat · 314

Koka · 314, 336

---

### **L**

lanjung · 314

---

### **M**

manoq · 314

Marlri Iting · 314

mavu · 314

Mohun · 314

---

### **N**

*nerlrapi* · 314

*nerlrlevanan* · 314

*ngangut pari* · 314

ngotom · 314

Ngumo · 314

*Nopup* · 314

---

novong · 314  
nuki · 314  
Nuki · 314  
nutung · 314

---

## **O**

*oheng* · 250  
Olok · 314  
orang Acue · 256, 296  
orang Amue · 256  
orang Auva · 256  
orang Halunge · 256, 296  
orlri ivut · 314  
*osang* · 314

---

## **P**

Pasuk · 314  
Penihing · 250, 418  
potang · 314

---

## **S**

so'an · 314  
*Supi Hauq* · 263, 275  
*supi mungun* · 263, 275  
*Supi Okiq* · 263, 275

---

## **T**

*taboo* · 250  
*tabu* · 250, 314  
*tana bara* · 314  
*tana bara motum* · 314  
*tana bara potiq* · 314  
*tana bara sungi* · 314  
*tana nyakit* · 314  
*tana tevorliq* · 314  
*tana tocom* · 314  
*tanga* · 314  
Teat · 314  
Teat Lemohon · 314  
terlreवान · 314  
Tu'an · 314, 336  
Tumat · 314

---

## **U**

*Uheng* · 250  
Uma' Asa · 239  
Uma' Lekue · 239  
Uma' Mahak · 239  
Uma' Pala · 239  
Uma' Suling · 239, 250  
Uma' Tepai · 239  
Uma' Tuan · 239  
Uma' Urut · 239  
Uma'Wak · 239  
umo · 340  
Uru Haring · 314

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian	
Tabel 2: Identifikasi Hukum Progresif	
Tabel 3: Administrasi Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu	

## BIO DATA

01. **Nama** : KOMEA AVAN, Moses
02. **Tempat dan tanggal lahir** : Kalimantan Timur, Kabupaten Mahaham Ulu, Desa Long Apari, 05 Februari 1968
03. **Riwayat pendidikan:**
- 1974- 1980 : SD Katolik - Long Apari.  
1981- 1982 : SMP Katolik - Samarinda.  
1982 - 1984 : SMP Negeri VI – Palaran.  
1984-1987 : SMU Seminari Don Bosco- Samarinda.  
1988-1992 : S-1 Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik – Ledalero – Flores.  
1993-1995 : Teologi Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik – Ledalero – Flores.  
2001-2002 : S-2 Iuris Canonici, Universitas Katolik Kepausan “Urbaniana”, Roma ,Italia.  
2002-2003 : S-3, Iuris Canonci, Universitas Katolik Kepausan “Urbaniana”, Roma, Italia.
04. **Pengaman Karya dan Organisasi:**
- Pastor Kepala di Gereja Katolik Paroki St. Eugenius de Mazenod, Tj Redeb – Berau : 1995-1999
  - Pastor Kepala di Gereja Hati Kudus Yesus – Mangkupalas – Samarinda Seberang : 2005-2010
  - Sekretaris Jendral Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur : 2005-2013
  - Vicaris General (Wakil Pimpinan Umum) Pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur : 2015-Skr.
  - Dosen pada Fakultas Hukum Untag 1945 Samarinda : 2015-Skr.
  - Dosen pada STKPK Bina Insan. : 2010-Skr.
  - Direktur Pusat Pelayanan Kemasyarakatan pada Gereja Katolik (Pusat Pastoral) di Kalimantan Timur : 2010-Skr.
  - Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi pada Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda, Kalimantan Timur : 2010-Skr.
  - Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Gereja Katolik Keuskupan Agung Samarinda, Kalimantan Timur : 2010- Skr.
  - Ketua Organ Pengawas Yayasan Setia Budi, Karya Kesehatan Gereja Katolik di Kalimantan Timur : 2008-2012.
  - Anggota Pembina Yayasan Setia Budi Samarinda, Karya Kesehatan Gereja Katolik di Kalimantan Timur. : 2015-Skr.
  - Anggota Pembina Yayasan P3R, Karya Pendidikan Gereja Katolik di Kalimantan Timur. : 2010-Skr.
  - Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur : 2007-Skr.